

Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Aek Martua Di Kabupaten Rokan Hulu

Sri Ratna Dewi¹ Parjiyana²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia.
sriratnadwi@student.uir.ac.id parjiyana@soc.uir.ac.id

Received : 11 Juni 2025

Abstract

The phenomena that occur in this study can be seen as Indicated that the Tourism and Culture Office of Rokan Hulu Regency has not yet increased the development of tourist destinations in Aek Martua. It is indicated that the Tourism and Culture Office of Rokan Hulu Regency has not completed the target of the work program. It is still indicated that the weakness of tourist destinations causes the management of Aek Martua tourism to be inadequate. The number of visitors has decreased significantly because tourist destinations have not been managed properly. Still lacking in publicizing tourist destinations as a driver of tourist attraction. The purpose of the study was to determine the role of the Tourism and Culture Office in the Development of Aek Martua Tourism Destinations in Rokan Hulu Regency and to determine the inhibiting factors in carrying out the role of the Tourism and Culture Office in the Development of Aek Martua Tourism Destinations in Rokan Hulu Regency. The type of research that will be used by this study is a descriptive survey with a quantitative method. The informants in this study consisted of the Head of the Tourism Office of Rokan Hulu Regency, the Head of Bangun Purba Village, the Sadar Wisata Community, the Surrounding Community, and Tourist Visitors. The data collection techniques used in this study were Questionnaires, Observations, Interviews, and Documents. Based on the results of the study conducted related to the Role of the Tourism and Culture Office in Developing the Aek Martua Tourist Destination in Rokan Hulu Regency, it is known that the role of the Tourism and Culture Office in Developing the Aek Martua Tourist Destination in Rokan Hulu Regency is lacking.

Keywords: Role, Development, and Tourism Destination

Abstrak

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini dapat dilihat seperti Terindikasi bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu masih belum meningkatkan pengembangan destinasi wisata yang ada di Aek Martua. Terindikasi bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu belum menyelesaikan target dari program kerja. Masih terindikasi bahwa lemahnya destinasi wisata menyebabkan pengelolaan wisata Aek Martua kurang memadai. Jumlah pengunjung yang menurun secara signifikan karena destinasi wisata belum di Kelola dengan baik. Masih kurang dalam mempublikasikan destinasi wisata sebagai pendorong daya tarik wisatawan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu. Tipe dari penelitian yang akan digunakan oleh peneltian ini adalah survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa Bangun Purba, Masyarakat Sadar Wisata, Masyarakat Sekitar, dan Pengunjung wisatawan.

Kata Kunci: Peran, Pengembangan, dan Destinasi Pariwisata
Pendahuluan

Sri Ratna Dewi dan Parjiyana

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 1 / 2025

238

Administrasi sebagai sesuatu yang di pergunakan untuk melaksanakan kegiatan seseorang individu ataupun sekelompok orang untuk mencapai tujuannya bersama. Administrasi ini sebagai proses pengorganisasian dari kegiatan, ide, tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Sampai pada tujuan ini sudah terlaksanakan dengan baik. Administasi merupakan seluruh proses Kerjasama antara perorangan atau sekelompok lebih yang didasarkan atas rasionalitas, dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Organisasi sebagai elemen kunci bagi sekelompok orang yang akan bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuannya tertentu karena organisasi ini sebagai tempat berkumpul orang dalam pemberian tugas dan tempat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya organisasi maka seseorang mampu melakukan pencapaiin tujuan secara bersama. Agar usaha dalam pencapaian tujuan ini menjadi lebih baik dan lebih mudah maka dalam menjalankan sebuah organisasi akan membutuhkan sebuah manajemen. Manajemen ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari organisasinya dan tujuannya. Manajemen sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan alat atau instalasi yang tersedia sebanyak mungkin, manajemen sebagai kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang didirikan dengan tujuan dari segenap bangsa dan seluruh dari tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dari kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial dan sebagaimana hal ini diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat. Dalam mencapai sebuah tujuan tersebut maka setiap dari manusia harusnya bernegara dalam menjalankan kehidupan didalam negara ini maka lahirlah pemerintah, menurut Syafi'e (2015: 32) pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang menunjukkan dan menjalankan kekuasaannya, pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya dalam pemerintahan Indonesia ini adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Indonesia terletak berada di samudera Hindia dan Pasifik dan diantara benua yaitu benua Asia dan Australia. Diantara dari benua Asia dan Australia ini negara-negara yang sedang mengalami perkembangan adalah Negara Republik Indonesia NKRI, beberapa pulau di Republik Indonesia ini sudah diakui secara internasional oleh negara dimanapun di dunia karena potensinya yang tidak tertandingi. Negara ini memiliki banyak pulau baik besar maupun kecil dengan keindahan yang berbeda-beda di daratan maupun di lautan, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, dan juga memiliki keragaman budaya dan seni yang berbeda di setiap daerahnya sehingga memberikan kekhasan daerah tersebut yang dapat diperkenalkan ke daerah lain bahkan sampai keluar negeri.

Indonesia yang kaya dengan wisata alam yang indah, wisata dari budaya yang menjadi warisan peninggalan nenek moyang yang menjadi cermin keberagaman dan keyakinan yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu industri pariwisata di Indonesia saat ini mulai berkembang dan menjadi daya pengikat tersendiri bagi masyarakat, baik didalam negeri maupun diluar negeri, sehingga dengan hal tersebut dapat diharapkan bahwa industri pariwisata nantinya

akan menjadi sumber pendapatan bagi devisa negara dan mampu memberikan sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pariwisata.

Pariwisata sering di kenal dengan pembangunan ekonomi yang tidak membutuhkan investasi yang begitu besar maka dengan itu dibutuhkan kesiapan dan pembenahan dalam bidang pengembangan dan pengelolaannya (Wahab, 2015: 42). Masyarakat Indonesia dengan hasil budayanya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi titik sentral untuk subjek pembangunan dan kekuatan dasar pembangunan pariwisata.

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah Ayat 1 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat

(3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dan pada pasal 12 ayat 3 ini menerangkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) meliputi:

1. Kelautan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energy dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Salah satu dari urusan pilihan yang dimaksud adalah pariwisata. Maka menurut Undang- Undang Kepariwisata Nomor 10 tahun 2009 huruf d adalah: “kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata yang bersifat multidimensi yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam ayat 4 juga dijelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidisiplin yang muncul sebagai sebuah wujud kebutuhan dari setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan pemerintah, dan pengusaha.

Seperti yang sudah diketahui bahwa tujuan dari pembangunan pariwisata adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengentaskan kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Pariwisata ini juga tidak bisa dipisahkan dari pembangunan suatu daerah karena merupakan salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan devisa negara selain dari sektor migas. Dan disamping itu pembangunan dari kepariwisataan memiliki tujuan untuk melestarikan alam, lingkungan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Berdasarkan itu juga maka daerah membentuk dinas pariwisata dan kebudayaan untuk membantu Kepala Daerah untuk mengelola kekayaan yang ada di daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 30 Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menerangkan bahwa kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/Kota
2. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota
3. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota
4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
5. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya
6. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya
7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru
8. Menyenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota
9. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya.
10. Menyenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata dan
11. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan

Salah satu Daerah Otonom yang sudah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. Sehubungan dengan penyelenggaraan tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020-2035 mempunyai tugas:

1. Meningkatkan daya tarik destinasi wisata sebagai modal pengembangan ekonomi wilayah kabupaten
2. Melestarikan wisata alam dan budaya sebagai bentuk dukungan pembangunan wisata berwawasan lingkungan
3. Memberikan pelatihan juga sertifikasi wisata halal bagi pelaku usaha
4. Memberikan pelayanan penunjang kepariwisataan bertaraf regional kepada masyarakat dan pengunjung
5. Membangun sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat yang kompeten sebagai tulang punggung pelayanan kepariwisataan dengan mempertimbangkan nilai budaya masyarakat lokal
6. **Mengembangkan destinasi pariwisata yang halal, aman, nyaman dan menarik serta berwawasan lingkungan.**

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan melindungi destinasi wisata nasional yang merupakan keindahan destinasi wisata potensial yang mana asetnya

belum dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu juga wisatawan juga bertanggungjawab untuk menciptakan suasana yang nyaman, tertib, bersih, perilaku yang baik dan perlindungan lingkungan daerah tujuan wisata dalam rangka menjaga dan memelihara daya tarik daerah tujuan wisata serta menjamin keberlangsungan daerah tujuan wisata, tujuan perjalanan, dan diketahui generasi selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu pada pasal 3 dijelaskan bahwa:

- (1) DISPARBUD sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2, memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) DISPARBUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, bidang pemasaran pariwisata, Bidang destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan
 - b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata,

Bidang destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan

- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang destinasi Pariwisata dan Bidang Kebudayaan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kewenangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang destinasi pariwisata
 - 1) Mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan pengembangan pariwisata dan sarana prasarana pariwisata
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala bidang Destinasi Pariwisata ini mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang destinasi wisata

- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang destinasi pariwisata
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata antara lain meliputi pengembangan pariwisata dan sarana prasarana pariwisata
 - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan daerah terkait dengan urusan destinasi pariwisata
 - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang destinasi pariwisata
- b. Bidang Kebudayaan
- 1) Bidang kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan kesenian, nilai-nilai budaya, museum, Sejarah dan purbakala
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepala bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi
 - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang kebudayaan
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang kebudayaan
 - c. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait urusan kebudayaan dan kesenian, Sejarah, serta cagar budaya dan koleksi museum
 - d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam perlindungan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Rokan Hulu.
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait urusan kebudayaan dan kesenian, Sejarah serta cagar budaya dan koleksi museum.

Pariwisata yang ada di Indonesia ini masih dikatakan belum optimal namun aspek ini juga sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat yang khususnya pendapatan asli daerah, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam telah menggunakan kekayaannya sebagai target untuk mendatangkan pendapatan asli daerah. Salah satu kekayaan alam Indonesia dengan berbagai fasilitas wisatanya ada di Kabupaten Rokan Hulu, Ibu Kota Pasir Pengaraian khususnya di Pulau Sumatera Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu hingga saat ini masih belum memiliki tempat wisata yang unggul dan menjadi pilihan untuk di kunjungi oleh masyarakat Riau. Tetapi bukan berarti Rokan Hulu tidak memiliki wisata, hanya saja tidak di Kelola dengan baik sehingga masyarakat cenderung memilih berwisata ke daerah tetangga yang lebih menarik, khususnya Aek Martua yang mana wisata

alam air terjun yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Wisata Aek Martua ini banyak dikunjungi oleh setiap orang dari mancanegara namun memiliki destinasi yang masih kurang diperhatikan oleh pemerintah Rokan Hulu sehingga untuk kondisi dan suasana yang ada di Aek Martua ini kurang terlihat menarik dan banyak keadaan atau fasilitas dari destinasi wisata yang harus di perhatikan dan di perbaiki.

Dengan hal ini apabila pengembangan dari destinasi wisata dan sumber daya manusia sekitar objek wisata ini baik maka dapat dipastikan akan memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan, ekonomi dan pendidikan masyarakat sekitar, adanya suatu destinasi wisata ini harus siap menerima dampak dari pariwisata yang terjadi baik dari aspek sosial budaya maupun ekonomi. Dan diperlukannya Kerjasama antara pemerintah daerah, investor maupun masyarakat sekitar untuk meminimalkan dampak pariwisata yang akan terjadi. Dalam pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih memiliki kendala yang secara signifikan harus dihadapi dengan baik seperti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri maupun dari wisatawan yang ingin berkunjung ke lokasi objek wisata. Tetapi beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini belum seluruhnya terealisasi secara maksimal yang harus di efektifkan secara optimal. Seksi yang menangani kunjungan dan promosi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini biasanya bagian seksi promosi pariwisata yang saling mendukung dan membantu pelaksanaan tugas dan pekerjaan untuk dinas yang berkaitan dengan mengadakan event atau acara dalam mendukung pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Administrasi secara umum juga dibedakan menjadi dua, yaitu arti sempit dan luas. Administrasi dalam arti sempit menurut Atmosudirjo (2007: 30) adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat mencatat, tulis menulis, korespondensi, kearsipan dan sebagainya. Selain itu menurut Nawawi (2009: 33) mengatakan bahwa administrasi merupakan catatan setiap komponen administrasi berupa manajemen, organisasi maupun kegiatan operasional. Menurut Harbani Pasalog (2017: 3) administrasi merupakan pekerjaan yang dilakukan secara terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan atas keefektifan, rasional dan efisiensinya. Sedangkan menurut Syafri (2012: 4) mengatakan administrasi adalah kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberina nomor atau kode surat, pengetikan, penyimpanan, pengiriman berbagai informasi yang dapat diterima atau yang sudah dikeluarkan oleh organisasi.

Menurut Zulkifli (2009: 20) ada tiga substansi yang terdapat didalam konsep administrasi

yaitu:

- a. Bahwa administrasi dapat diasumsikan sebagai seni. Keberhasilan dari penerapannya memerlukan teknik tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi pada waktu dan tempat dimana dia akan dijalankan.

- b. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur adanya dua orang atau lebih, adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
- c. Bahwa administrasi sebagai proses kerjasama yang bukan merupakan konsep yang baru, sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban mengenai keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Konsep Organisasi

Secara teoritis organisasi dapat dipahami dengan berbagai macam sudut pandang atau persepsi. Menurut Scoot (2003: 45) merupakan kesatuan yang secara rasional untuk mengejar suatu tujuan, sebagai koalisi yang mendukung secara kuat yang mana organisasi merupakan sebuah instrument untuk mengejar pada kepentingan masing-masing individual. Sebagai suatu system yang secara terbuka yang mana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung kepada input dari lingkungan, sebagai alat mendominasi dan banyak lagi persepsi yang dipakai untuk mendapatkan sebuah makna organisasi ini.

Karena dianggap system, organisasi ini merupakan setiap bentuk yang disekutukan antara dua orang manusia atau lebih yang bekerjasama secara formal yang terkait dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam sebuah ikatan yang mendapatkan pencapaian atau beberapa orang yang sudah disebut atasan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2011: 6-7).

Konsep Manajemen

Menurut Millet (2014: 1) manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang sudah menjadi bagian dari organisasi dalam kelompok formal dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Terry (2014: 1) manajemen ialah suatu proses atau kerangka pekerjaan yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan yang dimaksud dalam suatu organisasi yang nyata.

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengorganisasikan pada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sehingga akan menghasilkan suatu hal yang efisien. Menurut Dinn (2015: 5) Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan sebuah organisasi yang melalui rangkaian kegiatan yang berupa sebuah perencanaan, pengendalian dan pengarahan pada sumber daya organisasi lainnya. Manajemen menurut (Sukiswa (2013: 13) mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses social yang direncanakan untuk menjamin dalam kerjasama dalam berpartisipasi, intervensi, dan keterlibatan orang untuk mencapai sasaran tertentu yang ditetapkan secara efektif.

Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi. Pemerintah daerah atau kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pension, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai (Syafiie, 2003: 129). Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa: pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang di wujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluasnya yang merupakan sebuah keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsive untuk memaknai pembangunan (Rahman, 2004 : 229)

Konsep Peran

Peran merupakan sebuah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang didalam struktur sosial karena kedudukannya ini melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis yang mana dari pola tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal yang atau peristiwa (Soekanto, 2015: 3) status ataupun kedudukan ini tidak mampu terpisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukannya. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosialnya.

Menurut Rivai (2015: 42) peran merupakan perilaku seseorang yang dapat diharapkan untuk membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarahkan pada kemajuan, meskipun tidak selamanya ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut juga Rivai ini mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang tersebut dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas- tugas yang diberikan kepada nya atau tidak.

Pariwisata

Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. selanjutnya Marpaung (2015: 32) pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan dari pekerjaan- pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya.

Pariwisata merupakan fenomena kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok manusia kesuatu tempat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dimana perjalanan atau nafkat, selain itu kegiatan tersebut didukung dengan berbagai fasilitas yang ada di daerah tujuan tersebut yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. pariwisata ini merupakan sebuah industry yang terbesar dimana kegiatan pariwisata dapat meningkatkan anggaran pendapatan belanja dan pendapatan perekonomian masyarakat setempat (lokal) serta menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dan budaya (Ridwan, 2015: 43).

Pengembangan Pariwisata

Pengembangan biasanya tidak lepas dari sesuatu upaya atau dari pengembangan pada objek yang sudah dibangun. Suwanto (2015: 32) menyatakan bahwa pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk yang pelayanan berkualitas, seimbang, bertahan.

Pengembangan objek wisata menurut Pearce (2015: 310) diartikan sebagai suatu usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pengembangan ini bahwa faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan objek wisata menurut (Yoeti, 2014:32) yaitu:

- a. Tersedianya objek wisata dan daya tarik wisata
- b. Adanya fasilitas accessibility yaitu sarana dan prasarana sehingga memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata
- c. Tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kepada masyarakat

Metode

Tipe dari penelitian yang akan digunakan oleh peneltiian ini adalah survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Tipe dari penelitian survey deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki dengan menggunakan sejumlah sampel (responden) dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul lebih akurat dan nyata.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 80). Adapun yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini ialah 1 orang kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 3 orang staff bidang destinasi wisata, 3 orang staff bidang kebudayaan, 5 orang kelompok sadar wisata dan 850 orang wisatawan (pengunjung mancanegara dan domestik). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh keseluruhan populasi tersebut. Sampel yang diambil dari jumlah populasi pun juga harus representative (mewakili) karena jika tidak representative maka ibaratkan orang buta yang disuruh untuk menyimpulkan sebuah karakteristik hal yang besar.

Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara berikut Kuesioner, Observasi, Wawancara, Dan Dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis statistik yang dapat memberikan efisiensi dan aktifitas kerja yang membuat data lebih ringkas bentuknya.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Soekanto (2001:242) Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya. Terkait dengan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan destinasi pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu. Strategi mengembangkan air terjun Aek Martua merupakan hubungan dari faktor kekuatan dengan peluang. Adanya kekuatan berupa potensi air terjun Aek Martua dapat memanfaatkan peluang yang ada, yaitu sarana dan prasarana yang belum dibangun. Pembangunan sarana dan prasarana yang dimaksud disesuaikan dengan keinginan pengunjung seperti penginapan, tempat sampah, kamar mandi, penunjuk arah, tangga beton dan salah satu contohnya seperti sarana dan prasarana outbond yang banyak diinginkan pengunjung untuk ditambah pada air terjun Aek Martua. Pembangunan sarana dan prasarana outbond merupakan salah satu yang dapat dibangun tanpa harus merusak kawasan. Pengembangan kegiatan wisata alam di air terjun Aek Martua diharapkan bisa menjadi penunjang kepariwisataan Provinsi Riau khususnya Kabupaten Rokan Hulu, karena jumlah objek wisata bagi masyarakat Rokan Hulu sangat terbatas sehingga, sebaiknya dilakukan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung.

Peran Partisipatif

Menurut Soekanto (2001:242) peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Terkait dengan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan destinasi pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu.

Dukungan dari pemerintah daerah, terutama instansi terkait dalam pengembangan ekowisata. Selain itu juga diberikannya bantuan pendanaan untuk pengembangan fasilitas di sekitar Air terjun Aek Martua. Sebagai kawasan objek wisata yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat, peran pemerintah juga diperlukan dalam memberikan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan ekowisata masyarakat, Melakukan pengamanan di air terjun Aek Martua.

Peran Pasif

Menurut Soekanto (2001:242) peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Terkait dengan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan destinasi pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pengembangan destinasi pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu memang berada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu namun hal ini belum dirasakan kinerjanya oleh masyarakat sekitar lokasi wisata Aek Martua. Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu hanya berfokus pada lokasi wisata yang unggulan dan mejadi ikon Kabupaten Rokan Hulu sehingga masih banyak lokasi wisata yang belum di benahi secara langsung di lapangan termasuk air terjun Aek Martua.

Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu berusaha menjalin hubungan kerja pemerintah desa yang lokasi wisatanya belum diprioritaskan. Sedangkan pada air terjun aek martua kantor desa hanya sebatas koordinasi dan laporan dari masyarakat sekitar. Wisata unggulan sudah terjalin baik namun pada lokasi wisata yang belum tergolong di prioritaskan di Kabupaten Rokan Hulu belum terjalinnya hubungan kerja antar pemerintah dan masyarakat sekitar lokasi wisata. Sehingga Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu cenderung dilakukan oleh masyarakat yang banyak memberikan inisiatif khususnya pengembangan aek martua khususnya para pemuda. Sedangkan dari pemerintah khususnya pada pemerintah desa hanya menyetujui dan menerima laporan.

Faktor penghambat dalam melakukan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu

1. Fasilitas yang masih kurang

Fasilitas pariwisata adalah fasilitas utama yang menjadikan tempat wisata dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang berkunjung. Sedangkan sarana fasilitas yang disediakan guna memberikan pelayanan kepada para wisatawan, karena maju mundurnya sarana pariwisata tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Prasarana dan sarana dapat menjadi salah satu penunjang yang sangat penting agar daya tarik wisata banyak diminati wisatawan. Karena apabila prasarana dan saranatidak dikembangkan dengan baik akan berakibat berkurangnya minat wisatawan yang berkunjung

2. Koordinasi pemerintah masih kurang

Koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat menjadi bagian dari peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata. Koordinasi ini dapat membantu menciptakan kesamaan dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kegiatan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul. Selain koordinasi, peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata juga dapat mencakup:

- a. Menyediakan infrastruktur
- b. Memperluas fasilitas
- c. Memfasilitasi penanaman modal
- d. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata
- e. Menyiapkan sistem perencanaan tata ruang kawasan wisata
- f. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata

- g. Memenuhi fasilitas standar di kawasan wisata, seperti fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan komunikasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu diketahui bahwa kurang berperannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Aek Martua di Kabupaten Rokan Hulu hal ini terlihat dari sebaran kuesioner sebesar 48.98% dengan kategori kurang berperan. Sedangkan dari sisi hambatan terlihat dari fasilitas yang masih kurang dan koordinasi pemerintah masih kurang.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Atmosudirdjo, S. P. 2017. Hukum administrasi negara. Ghalia Indonesia
- Dinn, Wahyudin. 2015. Manajemen Kurikulum. Cet. 1. Banjarmasin: Pustaka Banua
- John D. Millet, 2014, Management in The Public Service: the Quest for Effective. Performance, McGraw Hill Book Company, Inc., New York.
- Marpaung, R. 2015. Kajian Mikrobiologi pada Produk Ikan Asin Kering yang Dipasarkan di Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan dalam Upaya Peningkatan Keamanan Pangan di Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.3
- Nawawi, H., & Hadari, M. 2009. Ilmu Administrasi. Jakarta: Ghalia Indonesia Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020-2035
- Rahman. 2004. Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana
- Richardson dan Flucker. 2015. Understanding and Managing Tourism. Person Education Australia, NSW Australia: Australia.
- Ridwan, Mohammad. 2015. Perencanaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata, Medan Polonia: PT. Sofmedia
- Rivai. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Depok: Raja Grafindo Persada
- Scott, Willian R., 2003, " Financial Accounting Theory, " Third Ed, University of. Waterloo, Prentice-Hall.
- Siagian, S. P. 2011. Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya. Bumi
- Sri Ratna Dewi dan Parjiyana
- Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 1 / 2025

Aksara

- Soekanto, Soerjono, 2015, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali. Jakarta
- Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukiswa. 2013. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Karyawan bagian GSE di PT. Lion Mentari Airlines Bandara Kualanamu. *Jurnal Ilman*, 4 (1), 47-58
- Suwarto. 2015. Pengaruh Budaya Organisasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan, Yogyakarta
- Syafiie, InuKencana, 2015. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta:Rineka Cipta
- Syafri, Wirman. 2003. Studi Tentang Administrasi Publik. PT. Gelora Aksara Pratama Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. PT. Gelora Aksara Pratama
- Terry, G. Rue. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab. 2015. Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara). Jakarta: Bumi Aksara
- Yoeti, 2014. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa
- Zulkifli, A. M. 2005. Manajemen Sistem Informasi. Gramedia Pustaka
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun

Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

- Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEEES 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEEES 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).

- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.